

KEGIATAN YANG PERLU DIKEMBANGKAN DALAM MENGATASI PERKAWINAN DINI DAN KEHAMILAN WANITA MUDA USIA

Oleh : H. M. Abdi Koro*

ABSTRACT

The incidence of underage female marriages and pregnancies are still frequently found in Indonesia. The causes are of various kinds, including sociocultural factors, socio-economic factors as well as socio-psychological factors. The results of this underage female marriages and pregnancies are of various kinds also. It can be observed from the aspects of not only demography and health, but the aspects of socio-culture, socio-economic and various aspects of other living phenomena as well.

To overcome underage female marriages and pregnancies, various activities need to be undertaken, which basically have as objectives to achieve the realization of a change in community attitude. This attitude in question is, in general, the will and preparedness to conduct marriage at a sufficiently mature age, minimally according to the stipulations of the marriage age-limit as regulated by the marriage law No. 1, 1974. This will lead to the achievement of the population and family planning objectives, namely the realization of the small, happy and prosperous family norms.

The programs that can be developed to achieve objectives like these are of various kinds. It can be directed to government officials, community leaders, parents, young eligible couples and the young generation themselves. The various programs meant, can be of a long term as well as short term nature.

Especially for the short term program, directed to the young generation, activities considered as suitable for implementation is the communication, information and education program, the implementation of which should be by exploiting the various communication media available in the community,

* Mantan Kepala Biro Pengawasan Hakim dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial RI; Ketua Widyaiswara Indonesia (IWI) se-Indonesia; Lektor Kepala Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan dosen beberapa Perguruan Tinggi dan Pascasarjana di Jakarta dan Bandung.

united and inter-sectoral in nature. In addition various activities of education to improve the skills, especially youths' drop-outs need to be undertaken as well.

To evade the possible emergence of unwanted side-effects, therefore, this communication, information and education should be conducted concurrently with a stable moral and religious education.

In order that the various programs planned can be properly realized, support from the various institutions in the community should also be developed. In addition, political support, not only from government officials but also from community leaders are needed.

A. PENDAHULUAN

Masalah kependudukan dewasa ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak karena masalah ini berhubungan erat dengan hampir keseluruhan aspek kehidupan bangsa kita, baik langsung maupun tidak langsung. Masalah kependudukan di Indonesia memperlihatkan ciri-ciri yang tidak menguntungkan bagi pembangunan bangsa dewasa ini dengan faktor utamanya adalah jumlah dan pertambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi disertai penyebaran penduduk yang kurang merata dengan komposisi umur yang lebih muda, di mana keseluruhan hal tersebut dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan dalam sistem kependudukan di Indonesia.

Program Keluarga Berencana dan Kependudukan merupakan salah satu di antara program pembangunan nasional dewasa ini, telah melaksanakan programnya secara berencana dan merata di seluruh wilayah Nusantara. Tujuan program Keluarga Berencana dan Kependudukan seperti tercantum dalam TAP MPR IV/1978 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertambahan penduduk Indonesia.

Dewasa ini, salah satu masalah yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan adalah komposisi penduduk usia muda dengan penduduk usia muda remaja yang sekaligus merupakan masa reproduksi pertama pada umur antara 16-24 tahun jumlahnya relatif cukup tinggi yakni sekitar 25% dari penduduk Indonesia. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila dalam usaha mengatasi besarnya

kelahiran dan penambahan penduduk khususnya, serta masalah kependudukan pada umurnya lebih diarahkan pada kelompok usia muda tersebut.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kependudukan yang merata di seluruh wilayah Nusantara, berbagai manfaat telah dirasakan dari hasil program tersebut, baik manfaat yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Pada masa sekarang ini, terutama dalam menghadapi Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sasaran lebih diarahkan pada kelompok usia remaja yang jumlahnya relatif semakin meningkat dibanding pada masa-masa sebelumnya.

Adapun masalah yang dirasakan dewasa ini dalam hubungannya dengan perkawinan dini dan kehamilan wanita muda usia, dapat diperinci dalam beberapa bagian utama.

1. Adanya kenyataan bahwa perkawinan dini dan kehamilan pada wanita muda usia relatif masih tinggi terutama di daerah pedesaan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial budaya, pola kehidupan ekonomi di pedesaan, faktor sosial psikologi serta faktor-faktor lainnya. (Data BPPKB 2009).
2. Akibat dari tingginya perkawinan dan kehamilan wanita muda usia seperti tersebut di atas, dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari.
 - a. Dari segi demografis, jumlah serta angka kelahiran relatif masih tetap tinggi disertai laju pertumbuhan penduduk yang juga tinggi yang secara langsung berhubungan dengan pemanfaatan masa reproduksi yang lebih panjang. (Data BPPKB 2009).
 - b. Dari segi kesehatan akan tampak akibat pada tingginya angka kesakitan serta angka kematian bayi dan ibu bersalin. (Data BPPKB 2009).
 - c. Dari segi sosial budaya, agama serta segi kehidupan lainnya, yang erat hubungannya dengan masalah kependudukan akan tampak akibat yang lebih tinggi serius antara lain meningkatnya angka tuna karya (penganggur), tuna susila serta berbagai masalah sosial lainnya, di mana keseluruhan permasalahan tersebut tadi

merupakan hal yang kait mengait satu dengan yang lainnya. (Data KESOS 2009).

3. Usaha pemerintah dalam meningkatkan usia perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 hingga saat ini belum terlaksana dengan baik di mana masih tampak hambatan-hambatan dalam segi penterapan serta pelaksanaannya. (Data Kemenag 2006).

C. TUJUAN

Adapun usaha peningkatan usia perkawinan dan kehamilan bertujuan untuk mencapai terwujudnya perubahan sikap masyarakat secara umum untuk melaksanakan perkawinan pada umur yang cukup dewasa, sekurang-kurangnya sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 dalam menuju tercapainya tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). (BPPKB-NAS).

D. KEBIJAKAN DASAR

Dalam usaha pencapaian tujuan seperti tersebut di atas, maka ditempuh suatu kebijakan dasar yang meliputi kebijakan umum dan kebijakan khusus.

1. Kebijakan umum

Kebijakan umum yang ditempuh dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2009/2010 adalah CATUR WARGA dalam arti satu Keluarga terdiri atas ayah, ibu serta dua anak saja (tanpa membedakan jenis kelamin anak).

Kebijakan ini ditempuh dengan strategi dasar yaitu PANCA KARYA yang meliputi lima kegiatan utama, serta dukungan utama program catur bahwa utama yang meliputi daya, dana, sarana dan metoda, yang perlu dimanfaatkan seefisien mungkin. Adapun lima kegiatan yang termasuk dalam panca karya meliputi hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang ditujukan kepada golongan usia muda di mana isteri belum mencapai usia 30 tahun dengan mengusahakan mereka mempunyai anak tidak lebih dari dua orang, tanpa membedakan laki maupun anak perempuan.
2. Kegiatan yang ditujukan pada pasangan usia subur di mana isteri telah berusia lebih dari 30 tahun dan telah mempunyai

- anak lebih atau sama dengan dua, dengan mengusahakan mereka untuk tidak lagi menambah jumlah anak yang telah dimilikinya.
3. Kegiatan yang ditujukan pada persiapan yang mantap bagi generasi muda untuk memahami hakekat dan Nilai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).
 4. Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat proses pelebagaan secara fisik usaha Kependudukan dan KB, sehingga secara kelompok dalam masyarakat makin lama semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dan kegiatan masyarakat itu sendiri. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan ekonomi dalam peningkatan pendapatan keluarga umpamanya melalui koperasi, serta usaha-usaha bantuan sosial lainnya.
 5. Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat proses pelebagaan mental serta dukungan yang bersifat psikologis termasuk kegiatan penitipan anak balita, program asuhan untuk usia lanjut, pembentukan jaminan hari tua dan lain sebagainya.

2. Kebijakan khusus

Kebijakan khusus ini sasaran utamanya adalah generasi muda sebagai kelompok penduduk Indonesia yang sangat potensial dan sangat menentukan pola kependudukan pada masa mendatang.

Kebijakan khusus ini dapat didasarkan pada UU No. 1/1974 tentang perkawinan, serta keputusan Presiden yaitu Keppres No. 52/1977 tentang pendapatan dan Keppres No. 38/1978 tentang BKKBN.

Adapun yang menjadi sasaran utamanya adalah generasi muda menjelang usia perkawinan serta pasangan usia subur yang masih muda. Selain itu juga sasaran ditujukan pada para orang tua yang mempunyai anak usia remaja/dewasa serta para tokoh masyarakat baik formal maupun yang nonformal, termasuk pemuka agama dan pemuka adat, dan organisasi-organisasi pemerintah/non pemerintah yang erat hubungannya atau yang menangani langsung masalah perkawinan.

Dalam hal pendekatan tersebut, maka proses terealisasinya kesadaran individu dan masyarakat harus melalui pendekatan kemasyarakatan yang bersifat manusiawi dengan tetap memperhatikan

norma-norma masyarakat yang ada serta dapat menjadi kebutuhan selayaknya bagi masyarakat itu sendiri.

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu adanya kesepakatan serta dukungan politis dari para pejabat pemerintah dan pemuka masyarakat, sehingga dengan demikian dirasa perlu adanya payung hukum berupa peraturan resmi, disertai kegiatan penataran dan latihan serta usaha-usaha lain secara intensif dan menyeluruh. Sedangkan di lain pihak, untuk mencegah ekses negatif sebagai akibat peningkatan usia kawin, maka kebijakan dasar ini harus pula dibarengi dengan pendidikan moral dan utamanya pendidikan agama yang lebih mantap.

Mengenai pola penggarapan program sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektoran dengan memperhatikan kondisi daerah dan masyarakat setempat. Dengan penanganan program melalui jalur terpadu maka kegiatan dapat berbentuk kegiatan baru secara lintas sektoral maupun kegiatan dalam bentuk meningkatkan/mengintensipkan program yang sudah sedang berjalan. Bentuk informasi yang diberikan sedapat mungkin bersifat edukatif yang mengarah pada tanggung jawab kepada keluarga disertai pendidikan yang informatif mengarah kepada terwujudnya kesadaran yang tinggi.

Pelaksanaan program dapat dilakukan melalui jalur terpadu yang telah ada meliputi penerangan tatap muka, penerangan kelompok dari berbagai pihak, penerangan melalui media massa serta pendidikan baik formal maupun non formal. Selain itu ditekankan pula pendidikan informal melalui jalur keluarga oleh orang tua sendiri terhadap anak-anaknya.

E. PROGRAM KEGIATAN OPERASIONAL

Program kegiatan operasional dapat dibagi dalam tahapan yakni jangka pendek dan jangka panjang.

1. Program jangka pendek.

a. Program yang kegiatannya diarahkan kepada penerapan pelaksanaan berbagai ketentuan yang telah ada meliputi:

- 1) Membantu penerapan dan penyelenggaraan ketentuan umur perkawinan dini minimal seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974.

- 2) Membantu membatasi atau meniadakan sarana sekali praktik kemudahan dalam proses perkawinan yang tidak menguntungkan.
 - 3) Menciptakan dukungan dan kesepakatan politis dan hukum dari semua pihak untuk berbagai upaya yang mengarah kepada pendidikan terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan dini.
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua bahan dan keterangan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini antara lain:
- 1) Mengidentifikasi semua unsur penunjang serta unsur penghambat terhadap usaha peningkatan usia perkawinan, baik di kota terutama di daerah pedesaan.
 - 2) Mengidentifikasi lembaga serta organisasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan dan diikutsertakan secara aktif dalam kegiatan peningkatan usia perkawinan.

2. Program jangka panjang

- a. Melanjutkan usaha-usaha yang telah dilaksanakan dan dicapai dalam program jangka pendek.
- b. Mengembangkan sistem administrasi yang sempurna dalam bidang pencatatan dan pelaporan berbagai peristiwa vital dalam masyarakat khususnya serta administrasi kependudukan pada umumnya sehingga tercipta ketertiban informasi data kependudukan.
- c. Mengusahakan adanya perubahan di dalam ketentuan tentang umur perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi 20 tahun untuk wanita serta 25 tahun untuk laki-laki.

Keseluruhan program kegiatan operasional seperti tersebut di atas terutama penerapan program jangka pendek, dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan yang meliputi: latihan serta kursus bagi tenaga pelaksana serta peningkatan keterampilan bagi remaja terutama mereka yang mengalami putus sekolah yang disertai dengan bimbingan dan pengarahan serta pengendalian kegiatan-kegiatan. Sedangkan untuk setiap

bentuk perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian program, sedapat mungkin didahului oleh rapat-rapat koordinasi untuk lebih memungkinkan penerapannya dalam bentuk lintas program maupun lintas sektoral.

Selain dari itu, kegiatan jaringan informasi perlu ditingkatkan serta lebih dikembangkan, di mana di samping memberikan informasi yang segar, juga untuk menghindarkan terjadinya duplikasi dalam berbagai bentuk usaha serta duplikasi penelitian yang berhubungan dengan perkawinan dini, khususnya peningkatan usia perkawinan yang mungkin diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Untuk mengetahui keberhasilan operasional serta untuk penyempumaan dan peningkatan rencana lebih lanjut, perlu diadakan penilaian hasil program melalui satu sistem pencatatan dan pelaporan yang baik lengkap dengan umpan balik kepada semua pihak yang terkait, serta melalui suatu penelitian atau studi evaluasi. Dalam penilaian program operasional tersebut di atas, perlu disusun kriteria keberhasilan antara lain:

- a. Meningkatnya umur perkawinan dan umur melahirkan anak yang pertama.
- b. Menurunnya angka perceraian serta angka fertilitas.
- c. Menurunnya/tercapainya target jumlah anggota keluarga dalam lingkungan pasangan usia muda.
- d. Menurunnya angka kematian bayi/anak dan ibu bersalin.
- e. Terjadinya perubahan sikap masyarakat yang tampak secara nyata, baik sikap terhadap perkawinan dini maupun sikap lainnya yang merugikan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh tim lintas sektoral atau oleh lembaga-lembaga penelitian dan lembaga perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

1. Masalah perkawinan diri dan kehamilan wanita muda usia masih merupakan salah satu masalah yang perlu segera mendapatkan penanganan secara mantap dan berencana.
2. Perlu dilaksanakan berbagai usaha dan kegiatan untuk meningkatkan usia perkawinan dengan kebijakan umum berdasarkan program catur warga menuju tercapainya Nilai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

3. Sasaran program terutama ditujukan pada kelompok generasi muda menjelang usia kawin serta pasangan usia subur yang masih muda tanpa mengakibatkan peranan orang tua serta para pemuka masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan dilandaskan pada program terpadu secara lintas sektoral dengan membantu pemerintah dalam menerapkan UU No. 1 Tahun 1974 dalam jangka pendek serta berusaha meningkatkan program melalui latihan dan peningkatan keterampilan remaja sedangkan dalam jangka panjang, menciptakan sistim pencatatan serta perubahan ketentuan usia perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.





KEPUSTAKAAN

- M. Sidharta: Menuju Kesejahteraan Jiwa, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1977.
- Sarlito W. Sarwono: Pergeseran Norma Perilaku Seksual Kaum Remaja, Penerbit C.V. Rajawali Jakarta, 1981.
- Sarlito W. Sarwono: Seksualitas & Fertilitas Remaja, Penerbit CV Rajawali Jakarta bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 1981.
- Sarlito W. Sarwono: Menuju Keluarga Bahagia, jilid 2, Penerbit Bhrata Karya Aksara Jakarta, 1982.
- S. Sadli: Faktor-faktor dan implikasi dari perkawinan dan kehamilan pada wanita muda usia di Indonesia ditinjau dari sudut Psikologi, makalah pada Seminar-Lokakarya Pengaruh Perkawinan dan Kehamilan pada Wanita Muda Usia, Jakarta Desember 1981, diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.

